

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pendidikan merupakan hal yang sangat penting, sebab pendidikan dijadikan suatu instrumen dalam penentuan pemberian kontribusi terhadap kemajuan suatu bangsa. Kualitas intelektual seorang manusia dapat dilihat seberapa tinggi seseorang tersebut mengenyam pendidikan. Melalui pendidikan diharapkan akan terjadi proses transmisi ilmu pengetahuan, keyakinan, nilai-nilai, keterampilan dan aspek-aspek penting lainnya dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sisdiknas, Pendidikan yaitu usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Tidak hanya itu, dengan adanya pendidikan manusia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, dengan cara bekerja.

Tingkat pendidikan merupakan salah satu syarat yang biasanya diwajibkan dalam melamar pekerjaan. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, akan semakin tinggi derajat dan jabatannya. Seseorang yang berpendidikan tinggi dalam masyarakat tentu saja akan dipandang lebih dan

harkat martabat keluarganya semakin meningkat. Juga dalam karier, seseorang yang berpendidikan tinggi akan menempati posisi yang tinggi dibandingkan dengan seseorang yang hanya berpendidikan rendah. Sudah tidak menjadi rahasia bila banyak orang berlomba-lomba dalam mengenyam pendidikan setinggi-tingginya. Masyarakat yang berpendidikan dan berkualitas tinggi merupakan suatu investasi bagi bangsa untuk membangun Negara Kesatuan Republik Indonesia ke arah yang lebih baik lagi. Terbentuknya kualitas pendidikan yang baik dapat mengantarkan masyarakat yang cerdas, mandiri dan berdikari.

Pemerintah sangat serius dan tidak menyepelekan urusan penyelenggaraan pendidikan, bukti tersebut dapat dilihat dengan adanya salah satu peraturan yang mengatur tentang pendidikan. Peraturan tersebut termuat dalam UUD 1945 pasal 31 ayat (1) yang disebutkan bahwa : Tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran; ayat (2) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional yang diatur dengan undang-undang. Dari penjelasan pasal ini, pemerintah mendapatkan amanat untuk menjamin hak-hak warga negara dalam mendapatkan layanan pendidikan, selain itu pemerintah juga berkewajiban untuk menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional. Maka untuk menjalankan amanat, pemerintah membuat Undang-Undang No 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional yang menjadi Arah Kebijakan pendidikan meliputi :

- a. Mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu tinggi bagi seluruh rakyat Indonesia menuju

terciptanya manusia Indonesia berkualitas tinggi dengan peningkatan anggaran pendidikan.

- b. Meningkatkan kemampuan akademik dan profesional serta meningkatkan jaminan kesejahteraan tenaga pendidik sehingga tenaga pendidik mampu berfungsi secara optimal terutama dalam peningkatan pendidikan watak dan budi pekerti agar dapat mengembalikan wibawa lembaga dan tenaga pendidikan.
- c. Melakukan pembaharuan kurikulum, berupa diversifikasi kurikulum untuk melayani keberagaman peserta didik, penyusunan kurikulum yang berlaku nasional dan lokal sesuai dengan kepentingan setempat, serta diversifikasi jenis pendidikan secara profesional.
- d. Memberdayakan lembaga pendidikan baik sekolah maupun luar sekolah sebagai pusat pembudayaan nilai, sikap, dan kemampuan, serta meningkatkan partisipasi keluarga dan masyarakat yang didukung oleh sarana dan prasarana memadai.
- e. Melakukan pembaharuan dan pemantapan sistem pendidikan nasional berdasarkan prinsip desentralisasi, otonomi keilmuan dan manajemen.
- f. Meningkatkan kualitas lembaga pendidikan yang diselenggarakan baik oleh masyarakat maupun pemerintah untuk menetapkan sistem pendidikan yang efektif dan efisien dalam menghadapi perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.
- g. Mengembangkan kualitas sumberdaya manusia sedini mungkin secara terarah, terpadu, dan menyeluruh melalui berbagai upaya proaktif dan reaktif oleh seluruh komponen bangsa agar generasi muda dapat

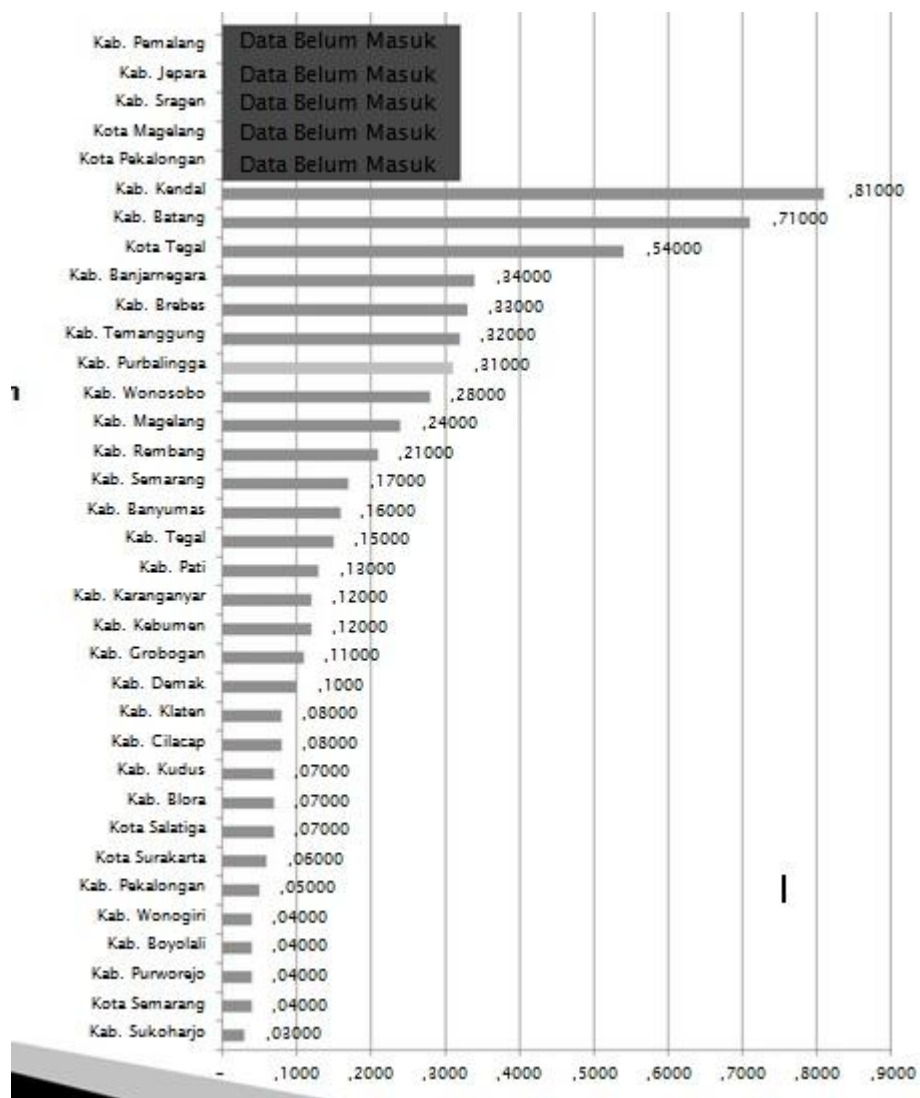
berkembang secara optimal disertai dengan hal dukungan dan lindungan sesuai dengan potensinya.

Arah kebijakan pendidikan didukung dengan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah pada Pasal 1 Ayat (5). Makna dalam undang-undang tentang Pemerintah Daerah maka melegitimasi untuk dilakukan desentralisasi pendidikan. Desentralisasi pendidikan diartikan sebagai suatu pelimpahan wewenang kepada pemerintah daerah untuk memiliki kemampuan dan kewenangan dalam menentukan arah kebijakan pembangunannya dibidang pendidikan, termasuk pemanfaatan segala aktifitas dan sumber pembiayaan yang tersedia. Desentralisasi pendidikan diharapkan sebagai suatu model yang dapat membuka peluang lebih besar bagi peningkatan mutu pendidikan dan pemerataan kesempatan masyarakat memperoleh pendidikan disetiap daerah, tidak terkecuali di Kabupaten Kudus.

Wajib belajar merupakan program pemerintah untuk memajukan pendidikan di Indonesia di mana sebelumnya pemerintah hanya mencanangkannya selama 9 tahun saja. Daerah yang telah tuntas wajib belajar 9 tahun diberikan keleluasaan untuk segera memulai pelaksanaan wajib belajar 12 tahun tanpa harus menunggu daerah lain. Di Kabupaten Kudus misalnya, setelah dinilai telah tuntas wajib belajar 9 tahun kini pemerintah Kabupaten Kudus kembali mencanangkan program Wajib Belajar 12 tahun. Program Wajib Belajar 12 tahun di Kabupaten Kudus diselenggarakan dengan tujuan untuk memberikan pendidikan yang terjangkau dan berkualitas bagi masyarakat. Pelaksanaan program Wajib

Belajar 12 tahun diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2010.

Gambar 1.1
Grafik Angka Putus Sekolah SMP Berdasarkan Peringkat Prov. Jateng 2017

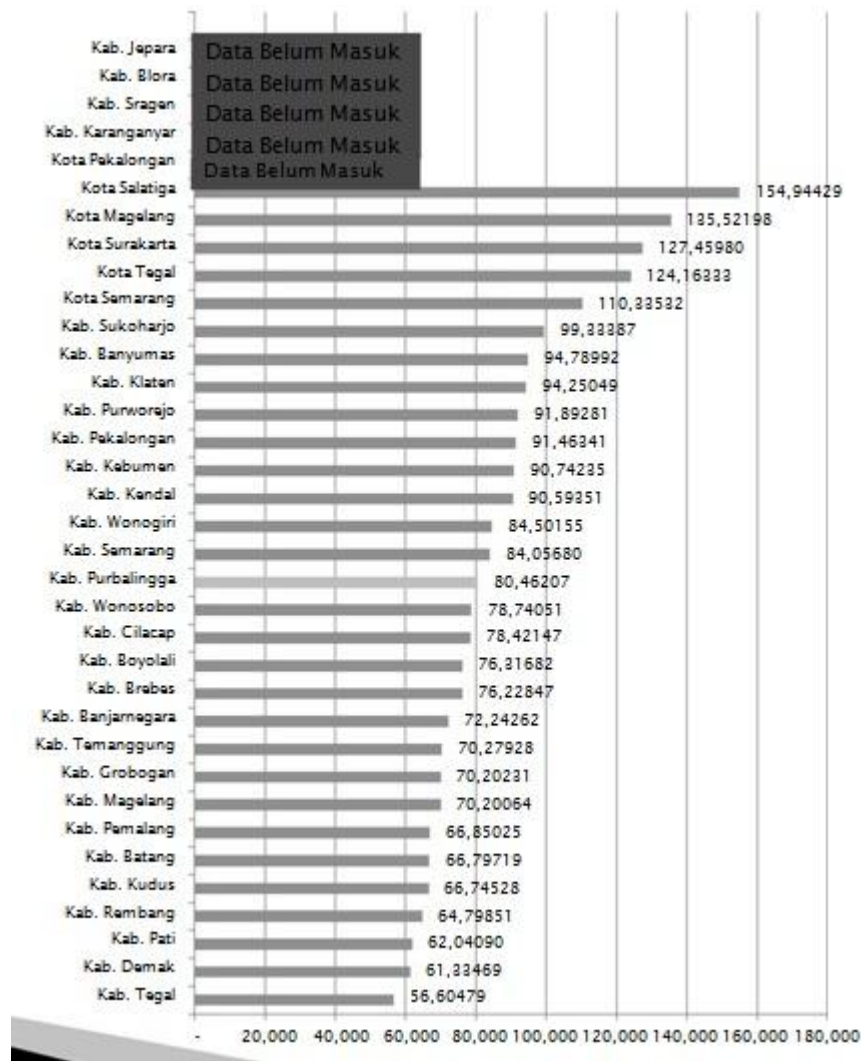


Sumber :Dinas pendidikan Kab/kota dan SMA, SMK profil.pdkjateng.go.id

Berdasarkan gambar 1.1 Angka putus sekolah di Kabupaten Kudus termasuk rendah pada angka 0,7000 akan tetapi masih dibawah Kabupaten

Blora, Salatiga dan Kabupaten/Kota lain yang notabnya tidak memiliki kebijakan pendidikan gratis.

Gambar 2.1
Grafik Angka Melanjutkan SMP Berdasarkan Peringkat Prov. Jateng 2017



Sumber :Dinas pendidikan Kab/kota dan SMA, SMK profil.pdkjateng.go.id

Terlihat dari gambar 1.2 Angka Melanjutkan SMP di Kabupaten Kudus rendah pada urutan ke 5 dengan angka 66,74528 diatas Kabupaten Tegal,

Demak, Pati, dan Rembang. Oleh karena itu perlu adanya tindakan pemerintah untuk mengatasi permasalahan tersebut.

Jika dilihat dari gambar 1.1 dan gambar 1.2 menunjukkan grafik angka putus sekolah SMP di Kabupaten Kudus rendah begitupula angka melanjutkan sekolah SMP di Kabupaten Kudus juga rendah. Seharusnya bila angka putus sekolah semakin kecil maka kondisi pendidikan di suatu wilayah semakin baik, akan tetapi angka melanjutkan sekolah / jumlah lulusan yang melanjutkan kejenjang pendidikan yang lebih tinggi di Kabupaten Kudus juga rendah.

Wajib belajar 12 tahun yang dicanangkan pemerintah dalam pelaksanaannya mempunyai 2 konsekuensi. Pada satu sisi, semua anak bangsa wajib bersekolah sampai batas yang ditentukan pemerintah. Sementara pada sisi lainnya, pemerintah diwajibkan untuk mengeluarkan semua biaya dan wajib menyediakan semua fasilitas penunjang dalam rangka mewujudkan wajib belajar 12 tahun. Keseriusan pemerintah dalam melaksanakan wajib belajar 12 tahun terbukti dengan adanya Program Indonesia Pintar (PIP) yang dapat menjamin semua hak dan kewajiban anak untuk tetap bersekolah sampai SMA.

Tingginya biaya pendidikan baik biaya langsung maupun tidak langsung yang ditanggung oleh peserta didik dirasa berat oleh orangtua siswa. Biaya langsung peserta didik antara lain iuran sekolah, buku, seragam, dan alat tulis, sementara biaya tidak langsung yang ditanggung oleh peserta didik antara lain biaya transportasi, kursus, uang saku dan biaya lain-lain. Dari grafik Angka Putus Sekolah SMP di Kabupaten

Kudus dan grafik Angka Melanjutkan Sekolah SMP menunjukkan hal yang bertolak belakang. Untuk itu, dalam penelitian ini data yang dijadikan pedoman adalah grafik Angka Melanjutkan Sekolah SMP di Kabupaten Kudus yang rendah. Angka Melanjutkan Sekolah SMP di Kabupaten Kudus rendah diakibatkan dari mahalnya biaya pendidikan itu sendiri.

Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19 Tahun 2016. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sesuai dengan tugas dan kewenangannya melaksanakan Program Indonesia Pintar dengan tujuan untuk meningkatkan akses bagi anak usia 6 sampai dengan 21 tahun untuk mendapatkan layanan pendidikan sampai tamat satuan pendidikan menengah, dan mencegah peserta didik dari kemungkinan putus sekolah (*drop out*). Program Indonesia Pintar diharapkan mampu menjamin peserta didik dapat melanjutkan pendidikan sampai tamat pendidikan menengah, dan menarik siswa putus sekolah atau tidak melanjutkan pendidikan agar kembali mendapatkan layanan pendidikan. PIP bukan hanya bagi peserta didik di sekolah, namun juga berlaku bagi peserta didik di Sanggar Kegiatan Belajar (SKB), Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), dan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP), atau satuan pendidikan nonformal lainnya, sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan.

Terdapat pula dalam Peraturan Bupati Kudus Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Pemberian Beasiswa Bagi Siswa Tidak/Kurang Mampu di Kabupaten Kudus bahwa dalam rangka membantu biaya pendidikan bagi

siswa tidak/kurang mampu dan membantu siswa tidak/kurang mampu supaya dapat membiayai keperluan sekolahnya agar tidak putus sekolah akibat kesulitan ekonomi serta mendukung pelaksanaan wajib belajar pendidikan 12 tahun yang bermutu dan terjangkau, perlu memberikan beasiswa bagi siswa tidak/kurang mampu di Kabupaten Kudus.

Berdasarkan laporan pelaksanaan PIP per 27 Agustus 2017, tercatat data total alokasi penyaluran dana PIP ditujukan pada 17.927.308 anak. Jumlah ini hampir sama dengan penerima PIP tahun 2018. Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) menganggarkan dana Rp9,344 triliun untuk Program Indonesia Pintar (PIP) pada 2018. Diharapkan program tersebut akan dapat mengatasi rendahnya APK sekaligus sebagai salah satu upaya pemerintah dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan bekal pendidikan dan ketrampilan yang lebih baik.

Di dalam penelitian ini, akan mengambil lokus di Kabupaten Kudus karena adanya permasalahan pelaksanaan Program Indonesia Pintar di Kabupaten Kudus, khususnya Kecamatan Gebog. Seperti dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 1.1
Penyaluran Dana Program Indonesia Pintar Pada Jenjang Pendidikan SMP di Kabupaten Kudus Tahun 2015-2017

No	Kecamatan	Disalurkan Tahun 2015		Dicairkan Tahun 2015		(%) Tahun 2015		Disalurkan Tahun 2016		Dicairkan Tahun 2016		(%) Tahun 2016		Disalurkan Tahun 2017		Dicairkan Tahun 2017		(%) Tahun 2017	
		Siswa	Dana	Siswa	Dana	Siswa	Dana	Siswa	Dana	Siswa	Dana	Siswa	Dana	Siswa	Dana	Siswa	Dana	Siswa	Dana
1	Bae	814	503.250.000	785	483.000.000	96,44	95,98	1237	683.625.000	1072	596.625.000	86,66	87,27	1129	627.750.000	882	525.750.000	78,12	83,83
2	Dawe	648	384.875.000	631	374.250.000	92,77	92,43	941	529.875.000	873	489.750.000	92,77	92,43	765	447.750.000	629	388.875.000	82,22	86,85
3	Gebog	627	385.875.000	621	382.500.000	99,04	99,13	932	489.375.000	447	268.125.000	47,96	54,79	815	457.875.000	616	361.500.000	75,58	78,95
4	Jati	665	406.500.000	638	388.125.000	95,94	95,48	976	594.375.000	807	500.625.000	82,68	84,23	1047	623.250.000	711	471.750.000	67,91	75,69
5	Jekulo	654	382.875.000	526	322.125.000	80,43	84,13	1077	583.500.000	787	427.875.000	73,07	73,33	767	444.000.000	575	350.250.000	74,97	78,89
6	Kaliwungu	1029	612.375.000	1013	603.375.000	98,45	98,53	1240	714.375.000	916	554.625.000	73,87	77,64	888	505.875.000	730	435.750.000	82,21	86,14
7	Kota	1042	651.000.000	1031	645.375.000	98,94	99,14	1665	950.250.000	1377	777.375.000	82,70	81,81	1284	719.250.000	868	541.875.000	67,60	75,34
8	Mejubo	501	298.875.000	396	242.250.000	79,04	81,05	788	448.875.000	418	238.875.000	53,05	53,22	885	521.250.000	534	320.250.000	60,34	61,44
9	Undaan	514	430.875.000	368	210.375.000	71,60	68,17	766	430.875.000	629	347.625.000	82,11	80,68	710	398.250.000	442	276.000.000	62,25	69,30
		6494	3.933.750.000	6009	3.651.375.000	92,53	92,82	9622	5.425.125.000	7326	4.201.500.000	76,14	77,45	8290	4.745.250.000	5257	3.672.000	63,41	77,38

Sumber : Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kudus

Seperti dapat dilihat, tabel 1.1 penyaluran dana Program Indonesia Pintar di Kabupaten Kudus pada tahun 2015-2017 menunjukkan presentase penurunan dari tahun ke tahun . Total presentase keseluruhan penyaluran dana Program Indonesia Pintar di Kabupaten Kudus pada tahun 2015 sebesar 92,82 % dan pada tahun 2016 sebesar 77,45 % dan tahun 2017 sebesar 77,38%. Akan tetapi disalah satu Kecamatan, yaitu Kecamatan Gebog menunjukkan angka yang fluktuatif. Penyaluran dana Program Indonesia Pintar di Kecamatan Gebog pada tahun 2015 sangat tinggi, yaitu sebesar 99,13%. Sementara itu penyaluran dana Program Indonesia Pintar di Kecamatan Gebog pada tahun 2016 menurun tajam, hanya sebesar 54,79%. Dan pada tahun 2017 presentase nya naik sebesar 78,95%. Dana bantuan yang diterima,nominalnya adalah Rp 750 ribu untuk setiap siswanya.

Menurut Kepala Bidang Pendidikan Dasar pada Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kudus, Kasmudi. Tidak tersalurkannya bantuan itu, disebabkan pihak penerima bantuan yakni siswa tidak mengambilnya. Untuk alasan kenapa tidak mengambil,juga tidak diketahui alasannya hingga kini. Di dalam penerimaan KIP (Kartu Indonesia Pintar) banyak terdapat kesalahan sasaran penerima Program Indonesia Pintar. Kurang handalnya pelaksana program Kartu Indonesia Pintar (KIP). Sistem pencairan dana di bank yang telah ditunjuk oleh pemerintah terkadang mengalami keterlambatan pencairan dana Program Indonesia Pintar (PIP). Hal ini dikarenakan pelayanan di bank yang

ditunjuk oleh pemerintah dan pelayanan bagi penerima Program Indonesia Pintar (PIP) hanya tersedia 1 loket saja.

Permasalahan selanjutnya teknis pengiriman kartu ke Rumah Tangga Sasaran (RTS) tidak merata dan waktu yang digunakan tidak bisa bersamaan. Tidak semua dana bantuan dari pemerintah pusat bisa diterima dengan baik dan dimanfaatkan warga. Siswa dan orang tua penerima bantuan Kartu Indonesia Pintar (KIP) dirasa kurang cekatan dalam proses pencairan dana, padahal siswa dan juga orangtunya telah diberitahukan bagaimana cara mencairkan dananya.

Dari Kecamatan Gebog dapat dilihat jumlah siswa penerima Program Indonesia Pintar pada tiap-tiap sekolah sebagai berikut :

Tabel 1.2
Jumlah Siswa Penerima Program Indonesia Pintar pada Jenjang Pendidikan SMP Tahun 2015-2017 di Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus

Nama Sekolah	Siswa Penerima Program Indonesia Pintar Tahun 2015	Siswa Penerima Program Indonesia Pintar Tahun 2016	Siswa Penerima Program Indonesia Pintar Tahun 2017
SMP Bhakti Praja	62	71	18
SMP 1 Gebog	151	407	171
Smp 2 Gebog	232	327	268
Smp 3 Satu Atap Gebog	178	123	63
Jumlah	623	928	520

Sumber: Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kudus

Dari tabel 1.2 terlihat jumlah siswa penerima program indonesia pintar pada jenjang pendidikan smp tahun 2015-2017 di kecamatan gebog kabupaten kudus menunjukkan angka fluktuatif. Pada tahun 2015 terdapat

623 siswa penerima Program Indonesia Pintar, kemudian pada tahun 2016 mengalami kenaikan sebesar 928 siswa dan pada tahun 2017 mengalami penurunan menjadi 520 siswa. Berbeda dengan di Kecamatan Gebog yang menunjukkan angka fluktuatif, jumlah siswa penerima program Indonesia Pintar di SMP 3 Satu Atap Gebog mengalami penurunan tajam dari tahun ke tahun. Penurunan jumlah siswa penerima Program Indonesia Pintar di SMP 3 Satu Atap Gebog Kudus dari tahun 2015 jumlah siswa penerima Program Indonesia Pintar sebanyak 178 siswa dan pada tahun 2017 menjadi 123, turun sebanyak 55 siswa dan pada tahun 2017 terjadi penurunan kembali sebanyak 60 siswa menjadi 63 siswa. Untuk itu, peneliti ingin mengambil lokus di SMP 3 N Satu Atap Gebog Kudus.

1.2 Rumusan Masalah

Dari latarbelakang yang telah disampaikan, maka dapat diketahui yang menjadi kajian penelitian, yaitu :

1. Bagaimana implementasi Program Indonesia Pintar (PIP) di SMP Negeri 3 Satu Atap Gebog Kudus?
2. Faktor-faktor penghambat implementasi Program Indonesia Pintar (PIP) di SMP Negeri 3 Satu Atap Gebog Kudus?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini adalah :

1. Mendeskripsikan implementasi Program Indonesia Pintar (PIP) di SMP Negeri 3 Satu Atap Gebog Kudus

2. Menganalisis faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan Program Indonesia Pintar (PIP) di SMP Negeri 3 Satu Atap Gebog Kudus

1.4 Kegunaan Penelitian

- 1) Kegunaan Teoritis
 - a. Dapat digunakan sebagai rujukan maupun bahan referensi mata kuliah terkait implementasi kebijakan.
 - b. Hasil Penelitian tentang implementasi kebijakan Program Indonesia Pintar (PIP) di SMP Negeri 3 Satu Atap Gebog Kudus merupakan kajian ilmiah dan diharapkan dapat menjadi wacana untuk menambah pengetahuan dan wawasan bagi penelitian berikutnya.
 - c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur dan sumber informasi di lingkungan Departemen Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro Semarang.
- 2) Kegunaan Praktis
 - a. Dapat digunakan sebagai rujukan maupun referensi bacaan bagi masyarakat terkait implementasi kebijakan.
 - b. Memberikan gambaran kepada masyarakat mengenai implementasi kebijakan.
 - c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu memberikan informasi dan masukan bagi pemerintah Kabupaten Kudus terkhusus Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga dalam pengambilan keputusan, terutama menyangkut keberlangsungan Program Indonesia Pintar.

3) Kegunaan bagi Penulis

Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat sebagai cara untuk mengamalkan ilmu yang didapat saat kuliah dengan melakukan penelitian ini dalam rangka menyelesaikan tugas akhir skripsi.

1.5 Kerangka Teori

1.5.1 Penelitian Terdahulu

No	Judul / Tahun	Tujuan	Penulis	Metode	Hasil Penelitian
1	Evaluasi Pemanfaatan Program Indonesia Pintar di SMK Cokroaminoto Pandak, 2016.	-	Budi Widodo	Kuantitatif	<ol style="list-style-type: none">1. Evaluasi Pemanfaatan Program Indonesia Pintar di SMK Cokroaminoto Pandak menurut Budi Widodo dapat disimpulkan menjadi tiga aspek Countenance Stake : yaitu aspek kesiapan penerima PIP (antecedents), Pelaksanaan PIP (Transaction), dan pemanfaatan PIP (outcomes). Pemanfaatan Program Indonesia Pintar secara keseluruhan termasuk dalam kategori baik.2. Faktor Pendukung pemanfaatan Program Indonesia Pintar antara lain: (a) Adanya pendataan awal siswa dari keluarga miskin di awal peserta didik besekolah. (b) Tim pelaksana PIP yang tidak mengalami pergantian dalam setiap tahunnya. (c) Kebijakan sekolah untuk mengelola dana PIP agar dapat maksimal dalam pemanfaatannya.3. Faktor Penghambat pemanfaatan Program Indonesia Pintar antara lain: (a) Kurangnya sosialisasi dari sekolah

					dan dinas terkait tentang PIP. (b) pemberitahuan informasi yang selalu mundur dari dinas terkait. (c) Waktu pencairan yang tidak sesuai dengan eaktu kebutuhan siswa. (d) Tidak adanya monitoring dalam pelaksanaan PIP.
2.	Pelaksanaan Program Indonesia Pintar (PIP) (Studi Kasus di SMP Negeri 9 Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya),2016.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan PIP di SMP Negeri 9 Sungai Raya 2. Mendeskripsikan pelaksanaan PIP yang terkait dengsn penggunaan dana dan penyaluran PIP di SMP Negeri 9 Sungai Raya 	Amirah Fazilah	Kualitatif	Pelaksanaan Program Indonesia Pintar (PIP) di SMP Negeri 9 Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya menurut Amirah Fazilah menunjukkan : sejumlah siswa penerima Program Indonesia Pintar (PIP), a) Tidak tepat sasaran dan pemanfaatan dana tersebut, b) Kurangnya sosialisasi kepada siswa tentang ketentuan Program Indonesia Pintar (PIP) sehingga mengakibatkan belum sepenuhnya siswa mengetahui tentang ketentuan dan prosedur dari program tersebut, c) Penggunaan dana oleh siswa tidak sepenuhnya untuk keperluan sekolah.
3.	Implementasi Kebijakan Kartu Indonesia Pintar Di Kecamatan Kaliwates Kabupaten	<ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk mengetahui sejauh mana implementasi kebijakan kartu indonesia pintar di Kecamatan Kaliwates. 2. Untuk mengetahui seberapa efektifkah peran pelaksana di lapangan. 	Rizky Hadiatullah	Kualitatif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Proses Implementasi Kebijakan Kartu Indonesia Pintar (KIP) ini memang sudah dijalankan oleh implementor atau pelaksana dilapangan sesuai dengan isi dari Kebijakan KIP 2. Efektivitas peran pelaksana dilapangan dalam hal pengimplementasiannya dilapangan masih kurang dengan

	Jember				diindikasikan bahwa masih banyak masyarakat yang terkadang merasa kesulitan untuk mendapatkan KIP.
4.	Sikap Masyarakat Terhadap Pemanfaatan Kartu Indonesia Pintar (KIP) di Kampung Lebak Manis Kelurahan Sukajawa Baru Kota Bandar Lampung,2017	Menjelaskan bagaimana sikap masyarakat terhadap pemanfaatan Kartu Indonesia Pintar (KIP) di Kampung Lebak Manis Kelurahan Sukajawa Kota Bandar Lampung	Triana Desita Sari	Kuantitatif	Sikap masyarakat terhadap pemanfaatan KIP adalah masyarakat telah menggunakan dana KIP sesuai prosedur, yaitu untuk membiayai iuran sekolah, transportasi sekolah, membiayai pakaian dan perlengkapan sekolah, membiayai biaya tambahan praktik pembelajaran dan kecenderungan tindakan masyarakat juga positif atau mendukung karena dana KIP yang diberikan tepat sasaran atau dalam hal ini benar diberikan kepada masyarakat yang lemah secara ekonomi.
5.	Hubungan Implementasi Program Keluarga Harapan Dinas Sosial dengan Peningkatan Tingkat Pendidikan di Desa Tanjung	-	Sekar Ayu Palupi	Kuantitatif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara implementasi Program Keluarga Harapan Dinas Sosial dengan peningkatan tingkat pendidikan di Desa Tanjung Kesuma Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur. Peningkatan taraf pendidikan ini dapat ditunjukkan dengan adanya anak-anak dari Rumah Tangga Sangat Miskin yang sudah mengenyam pendidikan dari tingkat Sekolah

	Kesuma Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur,2016.				Dasar ke tingkat Sekolah Menengah Pertama, selain itu anak-anak dari RSTM juga memiliki tingkat kehadiran yang baik saat disekolah.
--	---	--	--	--	---

1.5.2 Administrasi Publik

Leonard D. White dalam (Inu Kencana Syafiie, 2006:13), mendefinisikan Administrasi adalah suatu proses yang umum ada pada setiap usaha kelompok-kelompok, baik pemerintahan maupun swasta, baik sipil maupun militer, baik dalam ukuran besar maupun kecil.

Sedangkan Menurut Prajudi Atmosudirdjo dalam (Inu Kencana Syafiie 2006:13), Administrasi adalah suatu fenomenal sosial, suatu perwujudan tertentu di dalam masyarakat modern. Eksistensi daripada administrasi ini berkaitan dengan organisasi, artinya administrasi itu terdapat di dalam suatu organisasi. Jadi barang siapa hendak mengetahui adanya administrasi dalam masyarakat ia harus mencari terlebih dahulu suatu organisasi yang masih hidup, disitu terdapat administrasi.

Pengertian Publik menurut Inu Kencana Syafiie (2006: 18) adalah sejumlah manusia yang memiliki kebersamaan berpikir, perasaan, harapan, sikap dan tindakan yang benar dan baik berdasarkan nilai-nilai norma yang mereka miliki.

Edward H. Litchfield dalam buku Ilmu Administrasi Publik (Syafiie, 2006:25) Administrasi Publik adalah suatu studi mengenai bagaimana bermacam-macam badan pemerintahan diorganisasikan, dilengkapi dengan tenaga-tenaganya, dibiayai, digerakkan, dan dipimpin. Sedangkan menurut Prajudi Atmosudirdjo dalam buku Ilmu Administrasi Publik (Syafiie, 2006:25) mendefinisikan Administrasi Publik adalah administrasi dari Negara-negara sebagai organisasi, dan

administrasi yang mengejar tercapainya tujuan-tujuan yang bersifat kenegaraan.

Sebagai suatu sistem administrasi publik terdiri dari berbagai sub-sistem, antara lain tugas, fungsi, organisasi, kepegawaian, keuangan, materiil, dan lain-lain. Selanjutnya administrasi publik bersama-sama dengan sistem-sistem lain seperti sistem politik, sistem pemerintahan, dan sistem hukum tata Negara, merupakan sub-sistem dari sebuah system nasional suatu Negara. Jadi, oleh karena itulah keempat sistem ini dalam eksistensinya saling kait mengait, saling berinteraksi, saling mempengaruhi dan saling bertumpang tindih (*convergency*).

Dari pengertian Administrasi Publik diatas, didapat kesimpulan bahwa Administrasi Publik adalah kerjasama yang dilakukan organisasi pemerintahan dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dalam memenuhi kebutuhan publik secara efisien dan efektif. Didalam kajian teori selanjutnya, penulis akan membahas tentang Kebijakan Publik. Kebijakan publik merupakan salah satu bidang kajian yang menjadi pokok perhatian administrasi publik, karena selain menjadi penentu arah umum yang harus ditempuh untuk mengatasi isu-isu masyarakat, juga dapat dipergunakan untuk menentukan ruang lingkup permasalahan yang dihadapi oleh pemerintahan.

1.5.3 Kebijakan Publik

Kebijakan Publik merupakan aturan-aturan dan merupakan bagian dari keputusan politik yang mengikat bagi orang banyak pada tataran strategis atau bersifat garis besar yang dibuat oleh pemegang otoritas publik. Sebagai keputusan yang mengikat publik, maka kebijakan publik haruslah dibuat oleh otoritas publik, yakni menerima mandat dari publik atau orang banyak, setelah melalui proses pemilihan yang berlaku sesuai dengan amanat yang tercantum dalam konstitusi. Selanjutnya, kebijakan publik akan dilaksanakan oleh administrasi negara yang dijalankan oleh birokrasi pemerintah.

Dalam kehidupan masyarakat yang ada di wilayah hukum suatu negara sering terjadi berbagai permasalahan. Oleh karena itu dalam rangka menyeimbangkan peran negara yang mempunyai kewajiban menyediakan pelayanan publik dengan dibarengi hak menarik pajak dan retribusi, pemerintah memegang penuh tanggung jawab pada kehidupan rakyatnya dan harus mampu menyelesaikan berbagai permasalahan permasalahan tersebut. Kebijakan publik dibuat dan dilaksanakan untuk mengatasi berbagai permasalahan dan isu-isu yang ada dan berkembang di masyarakat.

Pengertian tentang apa itu kebijakan telah banyak didefinisikan oleh para ahli dan sumber. Menurut Robert Eyestone dalam (Budi Winarno, 2012: 20) bahwa secara luas kebijakan publik dapat didefinisikan sebagai hubungan suatu unit pemerintah dengan lingkungannya. Sedangkan Thomas R. Dye dalam (Budi Winarno, 2012:

20) mengatakan bahwa kebijakan publik adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Sementara itu definisi kebijakan publik menurut Chief J.O (1981) dalam Abdul Wahab, 2005:5 mengatakan:

“Suatu tindakan bersanksi yang mengarah pada tujuan tertentu yang diarahkan pada suatu masalah tertentu yang saling berkaitan yang mempengaruhi sebagian besar warga masyarakat”

Kebijakan publik adalah sebuah fakta integritas daripada fakta politis ataupun teknis. Sebagai sebuah strategi, dalam kebijakan publik sudah terangkum preferensi-preferensi politis dari para aktor yang terlibat dalam proses kebijakan, khususnya pada proses perumusan. Selanjutnya Nugroho (2008:54) mendefinisikan kebijakan publik :

“Kebijakan Publik adalah keputusan yang dibuat oleh negara, khususnya pemerintah, sebagai strategi untuk merealisasikan tujuan negara yang bersangkutan. Kebijakan Publik adalah strategi untuk mengantar masyarakat pada masa awal, memasuki masyarakat pada masa transisi, untuk menuju pada masyarakat yang dicita-citakan.”

Satu hal yang harus diingat dalam mendefinisikan kebijakan adalah bahwa pendefinisian kebijakan tetap harus mempunyai pengertian mengenai apa yang sebenarnya dilakukan, ketimbang apa yang diusulkan dalam tindakan mengenai suatu persoalan tertentu. Definisi kebijakan publik akan lebih tepat bila definisi tersebut mencakup pula arah tindakan atau apa yang dilakukan dan tidak semata-mata menyangkut usulan tindakan. Berkaitan dengan hal tersebut, James Anderson dalam Budi

Winarno, 2012 mendefinisikan kebijakan publik : “Kebijakan merupakan arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah atau suatu persoalan.”

Berdasarkan pengertian-pengertian tentang Kebijakan sebagaimana dijelaskan diatas penulis dapat simpulkan bahwa kebijakan publik adalah yang dipilih pemerintah untuk melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan berkaitan dengan pencapaian tujuan yang diinginkan ataupun penyelesaian masalah di suatu negara. Adapun sebuah kebijakan mempunyai tahap-tahap.

Tahap-tahap kebijakan publik yang sebagaimana dikemukakan oleh William Dunn dalam (Budi Winarno 2012: 35-37) yaitu:

1) Tahap Penyusunan Agenda

Para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada agenda publik. Sebelumnya masalah-masalah ini berkompetisi terlebih dahulu untuk dapat masuk ke dalam agenda kebijakan.

2) Tahap Formulasi Kebijakan

Masalah yang telah masuk ke agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan. Masing-masing alternatif bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk menyelesaikan masalah.

3) Tahap Adopsi Kebijakan

Dari sekian banyak alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh para perumus kebijakan, pada akhirnya salah satu dari alternatif kebijakan tersebut diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislatif, konsensus antara direktur lembaga atau keputusan pengadilan.

4) Tahap Implementasi Kebijakan

Kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasikan sumberdaya finansial dan manusia. Pada tahap ini berbagai kepentingan akan saling bersaing. Beberapa implementasi kebijakan mendapat dukungan para pelaksana (implementators), namun beberapa yang lain mungkin akan ditentang oleh pelaksana .

5) Tahap Evaluasi Kebijakan

Pada tahap ini kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau dievaluasi, untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat telah mampu menyelesaikan masalah.

Dalam tahapan-tahapan kebijakan publik yang telah dijelaskan diatas, penelitian ini mengangkat pada tahapan implementasi kebijakan. Dimana peneliti ingin melihat bagaimana pelaksanaan atau penerapan kebijakan yang telah diambil pemerintah.

1.5.4 Implementasi Kebijakan

Suatu implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar suatu kebijakan dapat mencapai tujuannya. Oleh karena itu disadari bahwa dengan mempelajari implementasi kebijakan sebagai suatu konsep akan dapat memberikan kemajuan dalam upaya-upaya pencapaian tujuan yang

telah diputuskan.

Implementasi merupakan tahap yang sangat menentukan di dalam proses kebijakan, karena tanpa implementasi yang efektif maka keputusan pembuat kebijakan tidak akan berhasil dilaksanakan. Guna memperoleh pemahaman yang baik mengenai implementasi kebijakan publik kita jangan hanya menyoroti perilaku lembaga-lembaga administrasi atau badan-badan yang bertanggung jawab atas suatu program beserta pelaksanaannya terhadap kelompok-kelompok yang menjadi sasaran, tetapi juga perlu memperhatikan berbagai jaringan kekuatan politik, sosial, ekonomi, yang langsung atau tidak langsung berpengaruh terhadap perilaku dari berbagai pihak yang terlibat dalam suatu program yang pada akhirnya membawa dampak pada program tersebut.

Kebijakan-kebijakan dapat dimodifikasi untuk menyesuaikan diri dengan kebutuhan-kebutuhan kelompok dan individu, yang dengan demikian tujuan umum dari kebijakan tersebut dapat saja dibelokkan. Mengingat bahwa dalam banyak kasus para pelaksana kebijakan-kebijakan publik tersebut adalah administrator publik, maka tidak heran apabila kemudian mereka pulalah yang paling sibuk memodifikasi kebijakan itu sendiri demi kepentingan rezim.

Beberapa definisi implementasi kebijakan publik menurut Jenkins dalam Parsons, 2006:463 studi implementasi adalah studi perubahan, bagaimana perubahan terjadi, bagaimana kemungkinan perubahan bisa dimunculkan. Pendapat lain dari Maxmanian dan Sabatier dalam Agustino,2006:139 Implementasi kebijakan adalah: “Pelaksanaan

keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasinya”.

Sedangkan, Van Meter dan Van Horn dalam (Agustino, 2006:139) mendefinisikan implementasi kebijakan publik sebagai : “Tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan”.

Tindakan-tindakan yang dimaksud dalam hal ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan-perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan- keputusan.

Menurut Van Meter dan Van Horn ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mengembangkan tipologi kebijakan publik yakni : pertama, kemungkinan implementasi yang efektif akan bergantung sebagian pada tipe kebijakan yang dipertimbangkan. Kedua, faktor-faktor tertentu yang mendorong realisasi atau non realisasi tujuan-tujuan program akan berbeda dari tipe kebijakan yang satu dengan tipe kebijakan yang lain. Suatu implementasi akan sangat berhasil bila perubahan marginal

diperlukan dan konsensus tujuan tinggi. Sebaliknya bila perubahan besar ditetapkan dan konsensus tujuan rendah maka prospek implementasi yang efektif akan sangat diragukan.

Dari beberapa definisi implementasi dapat disimpulkan bahwa implementasi dapat diartikan sebagai proses pelaksanaan dari kebijakan yang telah dirumuskan sebelumnya dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Perlu pula ditambahkan bahwa proses implementasi untuk sebagian besar dipengaruhi oleh macam tujuan-tujuan yang ingin dicapai dan oleh cara tujuan-tujuan itu dirumuskan. Dengan demikian benar implementasi merupakan tahap yang sangat menentukan di dalam proses kebijakan, karena melalui tahap ini keseluruhan prosedur kebijakan dapat dipengaruhi tingkat keberhasilan atau tidaknya pencapaian tujuan kebijakan tersebut.

Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua pilihan langkah, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut. Kebijakan publik dalam bentuk Undang-Undang atau Perda adalah jenis kebijakan yang memerlukan kebijakan publik penjelas atau yang sering diistilahkan sebagai peraturan pelaksanaan. Sedangkan kebijakan publik yang bisa langsung dioperasionalkan antara lain Keppres, Inpres, Kepmen, Keputusan Kepala Daerah, Keputusan Kepala Dinas, dan lain-lain.

Dalam penelitian ini mengangkat implementasi salah satu contoh kebijakan publik yang menarik peneliti, kebijakan publik tersebut

dijewantahkan dalam bentuk program. Implementasi program yang dilihat disini lebih menitik beratkan pada prosesnya. Proses implementasi Program dari mulai pendataan calon penerima bantuan, penginputan data calon penerima bantuan, pengesahan data usulan penerima bantuan, penetapan data usulan penerima bantuan, menyalurkan dana penerima bantuan hingga pencairan dana penerima bantuan.

1.5.5 Program

Program merupakan bagian dari perencanaan. Secara umum program diartikan sebagai penjabaran dari suatu perencanaan. Program sering pula diartikan sebagai suatu kerangka dasar dari pelaksanaan kegiatan. Untuk lebih memahami mengenai pengertian program, berikut ini akan dikemukakan beberapa definisi dari para ahli :

Program di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) didefinisikan sebagai rancangan mengenai asas-asas serta usaha-usaha yang akan dijalankan. Jones dalam Arif Rohman (2009: 101-102) menyebutkan program merupakan salah satu komponen dalam suatu kebijakan. Program merupakan upaya yang berwenang untuk mencapai tujuan. Menurut Charles O. Jones (Siti Erna Latifi Suryana, 2009: 28) ada tiga pilar aktivitas dalam mengoperasikan program yaitu :

1. Pengorganisasian

Struktur organisasi yang jelas diperlukan dalam mengoperasikan program sehingga tenaga pelaksana dapat terbentuk dari sumber daya manusia yang kompeten dan berkualitas.

2. Interpretasi

Para pelaksana harus mampu menjalankan program sesuai dengan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksana agar tujuan yang diharapkan dapat tercapai.

3. Penerapan atau Aplikasi

Perlu adanya pembuatan prosedur kerja yang jelas agar program kerja dapat berjalan sesuai dengan jadwal kegiatan sehingga tidak berbenturan dengan program lainnya.

Abdul Wahab (2008: 185) mengatakan bahwa: “Kebijakan-publik yang pada umumnya masih abstrak diterjemahkan ke dalam program-program yang lebih operasional yang kesemuanya dimaksudkan untuk mewujudkan tujuan-tujuan ataupun sasaran-sasaran yang telah dinyatakan dalam kebijakan tersebut”.

Penjabaran suatu program sedikitnya terlihat dari 5 (lima) hal yaitu:

1. Berbagai sasaran konkrit yang hendak dicapai
2. Jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan perkerjaan itu.
3. Besarnya biaya yang diperlukan beserta identifikasi sumbernya.
4. Jenis-jenis kegiatan operasional yang akan dilaksanakan.
5. Tenaga kerja yang dibutuhkan, baik ditinjau dari sudut kualifikasinya maupun ditinjau dari segi jumlahnya.

Program dalam konteks implementasi kebijakan publik terdiri dari tahap-tahap sebagai berikut:

1. Merancang (*design*) program beserta perincian tugas dan perumusan

tujuan yang jelas, penentuan ukuran prestasi yang jelas serta biaya dan waktu.

2. Melaksanakan (*aplication*) program dengan mendayagunakan struktur-struktur dan personalia, dan serta sumber-sumber lainnya, prosedur dan metode yang tepat.
3. Membangun sistem penjadwalan, monitoring dan sarana-sarana pengawasan yang tepat guna serta evaluasi (hasil) pelaksanaan kebijakan. (Tachjan, 2006i:35)

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa program sengaja dikembangkan guna mewujudkan tujuan-tujuan kebijakan yang kurang lebih sama. Sebelum suatu program diimplementasikan, terlebih dahulu harus diketahui secara jelas mengenai uraian pekerjaan yang dilakukan secara sistematis, tata cara pelaksanaan, jumlah anggaran yang dibutuhkan dan kapan waktu pelaksanaannya agar program yang direncanakan dapat berjalan dengan baik. Dari ketiga tahapan program dalam konteks implementasi kebijakan publik ini, peneliti hanya mengambil 2 tahapan saja, yaitu merancang (*design*) program dan melaksanakan (*aplication*) program karena 1 tahapan yang lain sudah bukan mengarah ke implelementasi kebijakan akan tetapi mengarah ke avaluasi kebijakan yang tidak masuk di dalam penelitian ini.

Program Indonesia Pintar adalah salah satu program nasional (tercantum dalam RPJMN 2015-2019) yang bertujuan untuk:

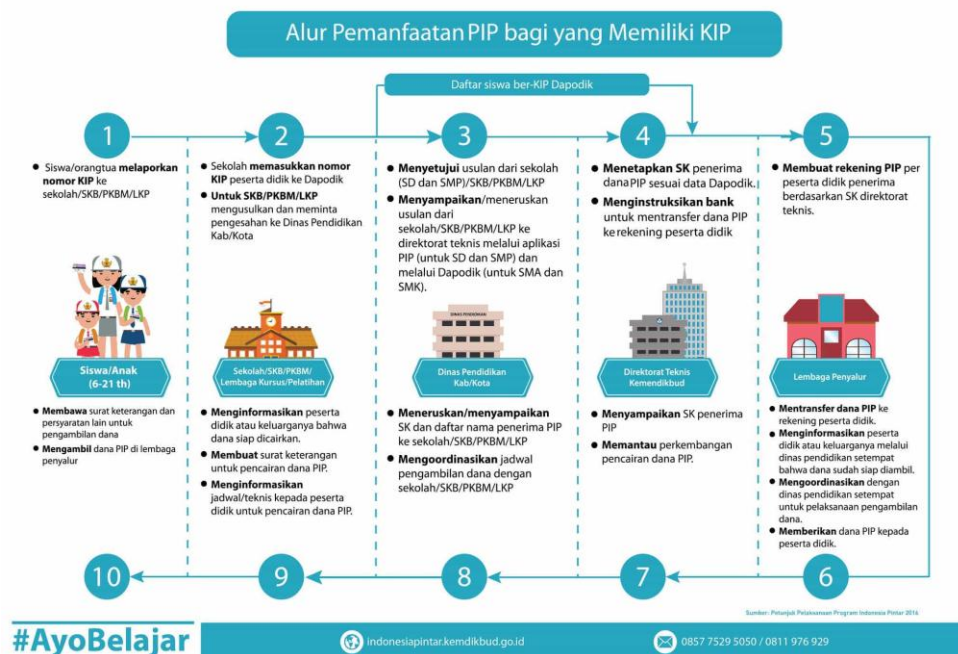
1. Meningkatkan angka partisipasi pendidikan dasar dan menengah.
2. Meningkatkan angka keberlanjutan pendidikan yang ditandai dengan menurunnya angka putus sekolah dan angka melanjutkan.

3. Menurunnya kesenjangan partisipasi pendidikan antar kelompok masyarakat, terutama antara penduduk kaya dan penduduk miskin, antara penduduk laki-laki dan penduduk perempuan, antara wilayah perkotaan dan perdesaan, dan antar daerah.
4. Meningkatkan kesiapan siswa pendidikan menengah untuk memasuki pasar kerja atau melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi.

Program Indonesia Pintar melalui KIP adalah pemberian bantuan tunai pendidikan kepada seluruh anak usia sekolah (6-21 tahun) yang menerima KIP, atau yang berasal dari keluarga miskin dan rentan (misalnya dari keluarga/rumah tangga pemegang Kartu Keluarga Sejahtera/KKS) atau anak yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Program Indonesia Pintar melalui KIP merupakan bagian penyempurnaan dari Program Bantuan Siswa Miskin (BSM) sejak akhir 2014.

Program Indonesia Pintar dilaksanakan dengan melibatkan instansi terkait antara lain mencakup tingkat sekolah/SKB/PKBM/LKP/BLK atau satuan pendidikan nonformal lainnya, dinas pendidikan kabupaten/kota, dinas pendidikan provinsi, direktorat teknis, dan lembaga penyalur. Dalam penelitian ini akan mengangkat tentang Program Indonesia Pintar, yang di implementasikan di SMP 3 Satu Atap Gebog Kabupaten Kudus. Dalam pelaksanaan Program Indonesia Pintar memiliki 2 alur pemanfaatan. Yang pertama alur pemanfaatan PIP bagi yang memiliki KIP dan tidak memiliki KIP.

Gambar 1.3
Alur Pemanfaatan PIP bagi yang Memiliki KIP



Sumber: Petunjuk Teknis Program Indonesia Pintar

Gambar 1.4
Alur Pemanfaatan PIP bagi yang Tidak Memiliki KIP



Sumber: Petunjuk Teknis Program Indonesia Pintar

Dalam penelitian ini peneliti ingin melihat implementasi yang ada di dalam 2 alur tersebut hanya pada implementasi yang dilaksanakan oleh sekolah dalam hal ini SMP 3 Satu Atap Gebog dan dinas pendidikan kab/kota dalam hal ini Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kudus. Sekolah menurut alur diatas melaksanakan Program Indonesia Pintar meliputi : Mengurus nomor KIP peserta didik ke Dapodik untuk yang memiliki KIP; menyeleksi dan menyusun daftar peserta didik sebagai calon penerima PIP, memasukkan daftar usulan peserta didik ke Dapodik, dan menyampaikan usulan ke Dinas Pendidikan untuk calon peserta yang tidak memiliki KIP. Setelah dana cair sekolah menginformasikan kepada penerima atau keluarganya bahwa dana siap dicairkan, membuat surat keterangan untuk pencairan dana PIP, dan menginformasikan jadwal/teknis pencairan dana PIP.

Sementara untuk Dinas Pendidikan Kab/Kota melaksanakan Program Indonesia Pintar meliputi : (Untuk penerima yang memiliki KIP) menyetujui usulan dari sekolah, menyampaikan/meneruskan dari sekolah ke direktorat teknis melalui aplikasi PIP. (Untuk penerima yang tidak memiliki KIP) Menetapkan SK penerima PIP sesuai data Dapodik, mengintruksikan lembaga penyalur untuk mentransfer dana PIP ke rekening peserta didik. Setelah dana cair Dinas Pendidikan meneruskan/menyampaikan SK dan daftar penerima PIP ke sekolah, mengkoordinasikan jadwal pengambilan dana dengan sekolah, menyampaikan SK penerima PIP ke sekolah/Dinas Pendidikan Kab/Kota, dan memantau perkembangan pencairan dana PIP.

1.5.6 Model-Model Implementasi Kebijakan

Dalam literatur ilmu kebijakan terdapat beberapa model implementasi kebijakan publik yang lazim dipergunakan. Pada prinsipnya terdapat dua pemilahan jenis teknik atau model implementasi kebijakan. Pemilahan pertama adalah implementasi kebijakan yang berpola “dari atas ke bawah” (*top-bottom*) versus “dari bawah ke atas” (*bottom-top*), dan pemilahan implementasi yang berpola paksa (*command-and-control*), dan mekanisme pasar (*economic incentive*) (Nugroho, 2003: 165). Namun secara umum model implementasi kebijakan yang dikemukakan para ahli lebih dipandang pemilahan yang pertama, yang lazim disebut model top-down dan bottom-up.

Model top-down berupa pola yang dikerjakan oleh pemerintah untuk rakyat, dimana partisipasi lebih berbentuk mobilisasi. Sebaliknya bottom-up bermakna meski kebijakan dibuat oleh pemerintah, namun pelaksanaannya oleh rakyat. Di antara keduanya ada interaksi pelaksanaan antara pemerintah dengan masyarakat (Nugroho, 2003: 167).

Beberapa model implementasi kebijakan dikemukakan oleh para ahli diantaranya model implementasi kebijakan George C. Edward III dengan *Direct and Indirect Impact on Implementation*, Donald Van Meter dan Carl Van Horn dengan *A Model of The Policy Implementation*, Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier dengan *A Framework for Policy Implementation Analysis*, dan Merille S. Grindle dengan *Implementation as A Political and Administration Process*.

Model implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Edward III disebut dengan Direct and Indirect Impact on Implementation. Menurut model yang dikemukakan oleh Edward III, ada empat faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan atau kegagalan implementasi suatu kebijakan, yaitu faktor sumber daya, birokrasi, komunikasi, dan disposisi, dalam (Agustino, 2006:156).

a) Faktor Sumber Daya

Faktor sumber daya mempunyai peranan penting dalam implementasi kebijakan, karena bagaimanapun dibutuhkan kejelasan dan konsistensi dalam menjalankan suatu kebijakan dari pelaksana kebijakan. Jika para personil yang mengimplementasikan kebijakan kurang bertanggung jawab dan kurang mempunyai sumber-sumber untuk melakukan pekerjaan secara efektif, maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan bisa efektif.

b) Faktor Komunikasi

Komunikasi adalah suatu kegiatan manusia untuk menyampaikan apa yang menjadi pemikiran dan perasaannya, harapan atau pengalamannya kepada orang lain. Faktor komunikasi dianggap sebagai faktor yang amat penting, karena menjembatani antara masyarakat dengan pemerintah dalam pelaksana kebijakan. Sehingga dapat diketahui apakah pelaksanaan kebijakan berjalan dengan efektif dan efisien tanpa ada yang dirugikan. Implementasi yang efektif baru akan terjadi apabila para pembuat kebijakan dan implementator mengetahui apa yang akan mereka kerjakan, dan hal itu hanya dapat diperoleh melalui komunikasi yang

baik.

c) Faktor Disposisi (sikap)

Disposisi ini diartikan sebagai sikap para pelaksana untuk mengimplementasikan kebijakan. Dalam implementasi kebijakan menurut Edward III, jika ingin berhasil secara efektif dan efisien, para implementator tidak hanya harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan dan mempunyai kemampuan untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut, tetapi mereka juga harus mempunyai kemauan untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut.

d) Faktor Struktur Birokrasi

Meskipun sumber-sumber untuk mengimplementasikan suatu kebijakan sudah mencukupi dan para implementator mengetahui apa dan bagaimana cara melakukannya, serta mereka mempunyai keinginan untuk melakukannya, implementasi kebijakan bisa jadi masih belum efektif, karena terdapat ketidakefisienan struktur birokrasi yang ada. Kebijakan yang begitu kompleks menuntut adanya kerjasama banyak orang. Birokrasi sebagai pelaksana sebuah kebijakan harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan jalan melakukan koordinasi yang baik.

Menurut Edward III terdapat dua karakteristik yang dapat mendongkrak kinerja struktur birokrasi ke arah yang lebih baik, yaitu dengan melakukan Standard Operating Procedures (SOPs) dan melaksanakan fragmentasi.

1) Standard Operating Procedures (SOPs); adalah suatu kegiatan rutin yang

memungkinkan para pegawai atau pelaksana kebijakan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatannya setiap hari sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

- 2) Fragmentasi; adalah upaya penyebaran tanggungjawab kegiatan-kegiatan dan aktivitas-aktivitas pegawai diantara beberapa unit.

Model implementasi kebijakan selanjutnya dikemukakan oleh Grindle ditentukan oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya. Ide dasarnya adalah bahwa setelah kebijakan ditransformasikan, barulah implementasi kebijakan hasilnya ditentukan oleh implementability. (Nugroho, 2008: 445) Menurutnya keberhasilan implementasi kebijakan dapat dilihat dari dua hal yaitu:

- 1) Dilihat dari prosesnya, dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang ditentukan (design) dengan merujuk pada aksi kebijakannya.
- 2) Apakah tujuan kebijakan tercapai. Dimensi ini diukur dengan melihat dua faktor, yaitu:
 - a. Dampak atau efeknya pada masyarakat secara individu dan kelompok
 - b. Tingkat perubahan yang terjadi serta penerimaan kelompok sasaran dan perubahan yang terjadi.

Keberhasilan implementasi kebijakan juga sangat ditentukan oleh tingkat implementability kebijakan itu sendiri, yaitu yang terdiri dari *Content of Policy* dan *Context of Policy*, Grindle dalam Agustino 2006:1168.

1) *Content of Policy* menurut Grindle adalah

- a. Kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi, berkaitan dengan berbagai kepentingan yang mempengaruhi suatu implementasi kebijakan, indikator ini berargumen bahwa suatu kebijakan dalam pelaksanaannya pasti melibatkan banyak kepentingan, dan sejauhmana kepentingan-kepentingan tersebut membawa pengaruh terhadap implementasinya.
- b. Jenis manfaat yang bisa diperoleh. Pada poin ini *Content of Policy* berupaya untuk menunjukkan atau menjelaskan bahwa dalam suatu kebijakan harus terdapat beberapa jenis manfaat yang menunjukkan dampak positif yang dihasilkan oleh pengimplementasian kebijakan yang hendak dilaksanakan.
- c. Derajat perubahan yang ingin dicapai. Setiap kebijakan mempunyai target yang hendak dan ingin dicapai. Adapun yang ingin dijelaskan pada poin ini adalah bahwa seberapa besar perubahan yang hendak atau ingin dicapai melalui suatu implementasi kebijakan harus mempunyai skala yang jelas.
- d. Letak pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan dalam suatu kebijakan mempunyai peranan penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan, maka pada bagian ini harus dijelaskan dimana letak pengambilan keputusan dari suatu kebijakan yang hendak diimplementasikan.
- e. Pelaksana program. Dalam menjalankan suatu kebijakan atau program harus didukung dengan adanya pelaksana kebijakan yang kompeten dan kapabel demi keberhasilan suatu kebijakan. Hal ini

harus terdata atau terpapar dengan baik pada bagian ini.

- f. Sumber-sumber daya yang digunakan. Pelaksanaan suatu kebijakan juga harus didukung oleh sumber-sumber daya yang mendukung agar pelaksanaannya berjalan dengan baik.

2) *Context of Policy* menurut Grindle adalah:

- a. Kekuasaan, kepentingan-kepentingan dan strategi dari aktor yang terlibat. Dalam suatu kebijakan perlu diperhitungkan pula kekuatan atau kekuasaan, kepentingan-kepentingan serta strategi yang digunakan oleh para aktor guna memperlancar jalannya pelaksanaan suatu implementasi kebijakan. Bila hal ini tidak diperhitungkan dengan matang, besar kemungkinan program yang hendak diimplementasikan akan jauh panggang dari api.
- b. Karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa. Lingkungan dimana suatu kebijakan dilaksanakan juga berpengaruh terhadap keberhasilannya, maka pada bagian ini ingin dijelaskan karakteristik dari lembaga yang akan turut mempengaruhi suatu kebijakan.
- c. Tingkat kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana. Hal lain yang dirasa penting dalam proses pelaksanaan suatu kebijakan adalah kepatuhan dan respon dari para pelaksana. Maka yang hendak dijelaskan pada poin ini adalah sejauhmana kepatuhan dan respon dari pelaksana dalam menanggapi suatu kebijakan.
- d. Pelaksanaan kebijakan yang ditentukan oleh isi atau konten dan lingkungan atau konteks yang diterapkan, maka akan dapat

diketahui apakah para pelaksana kebijakan dalam membuat sebuah kebijakan sesuai dengan apa yang diharapkan, juga dapat diketahui apakah suatu kebijakan dipengaruhi oleh suatu lingkungan, sehingga tingkat perubahan yang diharapkan terjadi.

Selanjutnya adalah Model implementasi kebijakan publik menurut Mazmanian dan Sabatier dikenal dengan *Kerangka Analisis Implementasi* (A Framework for Implementation Analysis). Mazmanian dan Sabatier mengklasifikasikan proses implementasi kebijakan kedalam tiga variabel (Nugroho, 2003: 169):

1. Variabel Independen, yaitu mudah tidaknya masalah dikendalikan yang berkenaan dengan indikator masalah teori dan teknis pelaksanaan, keragaman obyek, dan perubahan seperti apa yang dikehendaki.
2. Variabel Intervening, yaitu variabel kemampuan kebijakan untuk menstrukturkan proses implementasi dengan indikator kejelasan dan konsistensi tujuan, dipergunakannya teori kausal, ketepatan alokasi sumber dana, keterpaduan hierarkis diantara lembaga pelaksana, aturan pelaksana dari lembaga pelaksana, dan perekrutan pejabat pelaksana dan keterbukaan kepada pihak luar. Sedangkan variabel diluar kebijakan yang mempengaruhi proses implementasi yang berkenaan dengan indikator kondisi sosio-ekonomi dan teknomogi, dukungan publik, sikap dan risorsis dari konstituen, dukungan pejabat yang lebih tinggi, serta komitmen dan kualitas kepemimpinan dari pejabat pelaksana.
3. Variabel dependen, yaitu tahapan dalam proses implementasi dengan

lima tahapan, yaitu pemahaman dari lembaga/badan pelaksana dalam bentuk disusunnya kebijakan pelaksana, kepatuhan obyek, hasil nyata, penerimaan atas hasil nyata tersebut dan akhirnya mengarah kepada revisi atas kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan tersebut ataupun keseluruhan kebijakan yang bersifat mendasar.

Model implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn (1975) mengandaikan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linier dari kebijakan publik, implementator, dan kinerja kebijakan publik. Beberapa variabel yang dimasukkan sebagai variabel yang mempengaruhi kebijakan publik adalah variabel:

1. Ukuran (Standar) dan Tujuan Kebijakan

Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya jika dan hanya jika ukuran dan tujuan dari kebijakan memang realistis dengan sosio-kultur yang ada di level pelaksana kebijakan. Ketika ukuran kebijakan atau tujuan kebijakan terlalu ideal (bahkan terlalu utopis) untuk dilaksanakan di level warga, maka agak sulit merealisasikan kebijakan publik hingga titik yang dapat dikatakan berhasil.

2. Sumber daya

Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan suatu keberhasilan proses implementasi. Tahap-tahap tertentu dari keseluruhan proses implementasi menurut adanya sumber daya

manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara politik. Tetapi ketika kompetensi dan kapabilitas dari sumber-sumber daya itu nihil, maka sangat sulit untuk diharapkan.

Tetapi diluar sumber daya manusia, sumber daya lain yang perlu diperhitungkan juga ialah sumber daya finansial dan sumber daya waktu. Karena mau tidak mau ketika sumber daya manusia yang kompeten dan kapabel telah tersedia sedangkan pencairan dana melalui anggaran tidak tersedia, maka menjadi persoalan pelik untuk merealisasikan apa yang hendak dituju oleh kebijakan publik tersebut. Demikian halnya dengan sumber daya waktu, saat sumber daya manusia giat bekerja dan pencairan dana berjalan dengan lancar tetapi terbentur dengan persoalan waktu yang terlalu ketat, maka hal itu pun dapat menjadi penyebab ketidakberhasilan implementasi kebijakan.

3. Karakteristik Agen Pelaksana

Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi non formal yang akan terlibat pengimplementasian kebijakan publik. Hal ini sangat penting karena kinerja implementasi kebijakan publik akan sangat banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksananya. Misalnya implementasi kebijakan publik yang berusaha untuk merubah perilaku atau tingkah laku manusia secara radikal, maka agen pelaksana proyek itu haruslah berkarakteristik keras dan ketat pada aturan serta sanksi hukum. Sedangkan bila kebijakan publik itu tidak terlalu merubah

perilaku dasar manusia maka dapat saja agen pelaksana yang diturunkan tidak sekeras dan tidak setegas pada gambaran yang pertama. Selain itu cakupan atau luas wilayah implementasi kebijakan perlu juga diperhitungkan manakala hendak menentukan agen pelaksana. Maka seharusnya semakin besar pula agen yang dilibatkan. Van Meter dan Van Horn mengemukakan beberapa unsur yang mungkin berpengaruh terhadap suatu organisasi dalam mengimplementasikan kebijakan:

- 1) Kompetensi dan ukuran staf suatu badan.
 - 2) Tingkat pengawasan hierarkis terhadap keputusan sub unit dan proses dalam badan-badan pelaksana.
 - 3) Sumber-sumber politik suatu organisasi (misalnya dukungan diantara anggota legislatif dan eksekutif)
 - 4) Vitalitas suatu organisasi
 - 5) Tingkat komunikasi-komunikasi “terbuka”, yang jaringan kerja komunikasi horizontal dan vertikal secara bebas serta tingkat kebebasan yang secara relatif tinggi dalam komunikasi dengan individu-individu diluar organisasi.
 - 6) Kaitan formal dan informal suatu badan dengan “pembuat keputusan” atau “pelaksana keputusan”.
4. Komunikasi antar organisasi aktivitas pelaksana

Koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan publik. Semakin baik komunikasi dan koordinasi diantara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka

asumsinya kesalahan-kesalahan akan sangat kecil untuk terjadi. Dan begitu pula sebaliknya.

5. Lingkungan ekonomi, sosial, dan politik

Hal lain yang perlu diperhatikan guna menilai kinerja implementasi kebijakan publik dalam perspektif yang ditawarkan oleh Van Meter dan Van Horn adalah sejauhmana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi penyebab dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Olehnya itu, upaya untuk mengimplementasikan kebijakan harus pula memperhatikan kekondusifan lingkungan eksternal. Van Meter dan Van Horn juga mengajukan hipotesis bahwa lingkungan ekonomi, sosial, dan politik dari yuridiksi atau organisasi pelaksana akan mempengaruhi karakter badan-badan pelaksana, kecenderungan-kecenderungan para pelaksana dan pencapaian itu sendiri.

Kondisi-kondisi lingkungan dapat mempunyai pengaruh yang penting pada keinginan dan kemampuan yuridiksi atau organisasi dalam mendukung struktur, vitalitas, dan keahlian yang ada dalam badan-badan administrasi maupun tingkat dukungan politik yang dimiliki. Kondisi lingkungan juga akan berpengaruh pada kecenderungan-kecenderungan para pelaksana. Jika masalah-masalah yang dapat diselesaikan oleh suatu program begitu berat dan para warga negara swasta serta kelompok-kelompok kepentingan di mobilisasi untuk mendukung suatu program maka besar kemungkinan

para pelaksana menolak program tersebut.

Van Meter dan Van Horn lebih lanjut menyatakan bahwa kondisi lingkungan mungkin menyebabkan para pelaksana suatu kebijakan tanpa mengubah pilihan-pilihan pribadi mereka tentang kebijakan itu. Namun akhirnya variabel-variabel lingkungan ini dipandang mempunyai pengaruh langsung pelayanan publik yang dilakukan. Dengan kata lain, kondisi-kondisi lingkungan mungkin memperbesar atau membatasi pencapaian, sekalipun kecenderungan-kecenderungan para pelaksana dan kekuatan-kekuatan lain dalam model ini juga mempunyai pengaruh terhadap implementasi program.

6. Kecenderungan (*disposition*) dari para pelaksana/implementor

Sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana akan sangat banyak mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi oleh karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul persoalan dan permasalahan yang mereka rasakan. Melainkan kebijakan yang akan implementor laksanakan adalah kebijakan “dari atas ke bawah” (*top down*) yang sangat mungkin para pengambil keputusannya tidak mengetahui (bahkan tidak mampu menyentuh) kebutuhan, keinginan, atau permasalahan yang warga ingin selesaikan.

1.6 Fenomena Penelitian

Fenomena penelitian yang akan dibahas dalam penelitian ini akan melihat bagaimana proses implementasi Program Indonesia Pintar di SMP N 3 Satu Atap Gebog Kudus menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Indonesia Pintar.

1. Implementasi

Implementasi merupakan bentuk dari eksekusi dari Program Indonesia Pintar. Implementasi disini dapat dilihat dengan :

A. Tujuan program indonesia pintar di Smp 3 Satu Atap Gebog Kudus

- 1) Meningkatkan akses bagi anak usia 6 sampai 21 tahun untuk mendapatkan layanan pendidikan sampai tamat satuan pendidikan menengah untuk mendukung pelaksanaan Pendidikan Menengah Universal/Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun.
- 2) Meringankan biaya personal pendidikan.
- 3) Mencegah peserta didik dari kemungkinan putus sekolah (drop out) atau tidak melanjutkan pendidikan akibat kesulitan ekonomi.
- 4) Menarik siswa putus sekolah (drop out) atau tidak melanjutkan agar kembali mendapatkan layanan pendidikan di Sekolah/Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) / Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) / Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) atau satuan pendidikan nonformal lainnya.

B. Sosialisasi Program Indonesia Pintar

C. Mekanisme Pendataan dan Verifikasi Data

1. Mekanisme Pengusulan Calon Penerima Program Indonesia Pintar

2. Mekanisme Mendapatkan Kartu Indonesia Pintar
3. Mekanisme Penetapan Penerima Program Indonesia Pintar
4. Kendala dalam Pendataan dan Verifikasi Data

D. Mekanisme Penyaluran Dana

E. Mekanisme Pengawasan dan Pelaporan Penggunaan Dana

- a. Pemanfaatan Dana Program Indonesia Pintar
- b. Pelanggaran dan Pemberian Sanksi dalam Program Indonesia Pintar
- c. Partisipasi dalam Pengawasan dan Pelaporan

2. Komunikasi

Komunikasi yang dimaksud merupakan hal yang mempengaruhi implementasi Program Indonesia Pintar dengan difokuskan pada komunikasi antar aktor pelaksana.

Gejala komunikasi :

- 1) Kelancaran program transmisi, dapat diukur dengan :
 - a. Intensitas pertemuan antara aparatur pelaksana dan penerima program
 - b. Media yang digunakan dalam proses komunikasi
- 2) Kejelasan perintah implementasi program, dapat diukur dengan :
 - a. Kejelasan program
 - b. Informasi yang diterima

- 3) Konsistensi pelaksanaan kebijakan, dapat diukur dengan :
 - a. Ketepatan informasi
 - b. Tingkat sosialisasi

3. Sumber Daya

Sumber daya memiliki peranan penting dalam implementasi kebijakan. Implementasi kebijakan tidak akan berhasil tanpa adanya dukungan dari sumber daya yang cukup kualitas dan kuantitasnya.

- a. Sumber daya manusia yang dimiliki untuk pelaksanaan kebijakan Program Indonesia Pintar
- b. Dukungan anggaran untuk pelaksanaan kebijakan Program Indonesia Pintar
- c. Sarana dan prasarana penunjang yang dimiliki untuk pelaksanaan kebijakan Program Indonesia Pintar.

4. Karakteristik Agen Pelaksana

- a. Pusat perhatian agen pelaksana
- b. Karakter agen pelaksana

5. Lingkungan ekonomi, sosial dan politik

Pengaruh lingkungan eksternal terhadap implementasi program

Fenomena dalam penelitian ini tidak menutup kemungkinan untuk mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan hasil penelitian yang diperoleh dilapangan.

1.7 Metoda Penelitian

1.7.1 Desain Penelitian

Dalam penelitian Implementasi Program Indonesia Pintar di SMP N 3 Satu Atap Gebog Kabupaten Kudus, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi, analisis data bersifat induktif, dan penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi (Sugiyono, 2009:1).

Jadi yang akan dihasilkan dalam penelitian ini adalah berbentuk kata, kalimat, untuk mengeksplorasi bagaimana kondisi faktual yang terjadi dengan mendeskripsikan variabel yang sesuai dengan masalah dan unit yang diteliti dalam hal ini adalah mengenai Implementasi Program Indonesia Pintar di SMP N 3 Satu Atap Gebog Kabupaten Kudus, guna mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan kendala di dalam mengimplementasikan program tersebut.

1.7.2 Situs Penelitian

Yang dimaksud dengan situs penelitian ini adalah suatu tempat dimana peneliti menangkap keadaan sebenarnya dari objek yang diteliti untuk memperoleh data atau informasi yang diperlukan. Sesuai

dengan permasalahan yang dikemukakan dalam bab terdahulu, maka penetapan situs penelitian adalah SMP N 3 Satu Atap Gebog Kabupaten Kudus dan di Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kudus.

Lokasi penelitian di SMP N 3 Satu Atap Gebog sengaja dipilih karena peneliti ingin mengkaji secara mendalam permasalahan di wilayah tersebut. Disamping itu peneliti berharap mendapatkan temuan yang berguna dalam pemecahan masalah dari permasalahan yang terjadi dalam Program Indonesia Pintar. Sehingga Program Indonesia Pintar dapat diterima dan diimplementasikan secara baik.

1.7.3 Subjek Penelitian

Subjek penelitian yang digunakan adalah menggunakan Teknik sampling. Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling, yaitu teknik penentuan sample dengan pertimbangan tertentu yang sengaja ditentukan oleh peneliti tetapi tidak melalui proses pemilihan seperti yang dilakukan dalam teknik random. Teknik sampling purposive adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Atau teknik *purposive* merupakan teknik yang berdasarkan kapasitas diri seseorang yang dianggap paling tahu dan memiliki kekuasaan sehingga dapat memberikan akses kepada peneliti untuk menjelajahi objek/situasi yang akan diteliti.

No	Informan	Keterangan
1	Fitriani, S.Pd	Penanggungjawab Program Indonesia Pintar di Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kudus
2	Wahyu Wiyanto	Penanggungjawab Program Indonesia Pintar di Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kudus
3	Sugianto	Penanggungjawab Program Indonesia Pintar di Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kudus
4	Sugiarto, S.Pd.	Penanggungjawab Program Indonesia Pintar di SMP Negeri 3 Satu Atap Gebog Kudus
5	Wildaniyah, S.Ag.	Operator Program Indonesia Pintar di SMP Negeri 3 Satu Atap Gebog Kudus
6	Sri Wartiah (Orangtua Nurul Wahyu Erista)	Wali murid dari siswa penerima Program Indonesia Pintar
7	Sri Ngatmini (Orangtua Eko Susanto)	Wali murid dari siswa penerima Program Indonesia Pintar
8	Suntari (Orangtua Ayu Rismawati)	Wali murid dari siswa penerima Program Indonesia Pintar

1.7.4 Jenis Data

Penelitian yang dilakukan harus membutuhkan data dan informasi yang cukup relevan yang menyangkut dengan apa yang diteliti untuk penelitian tersebut. Untuk itu diperlukan beberapa metode untuk pengumpulan data yang digunakan untuk penelitian. Data yang digunakan yaitu seperti dokumen-dokumen dari laporan kegiatan yang ada pada periode tahun yang ditentukan.

Tipe penelitian deskriptif kualitatif. Bogdan dan Taylor (Moelong, 2004: 67) mendefinisikan deskriptif kualitatif sebagai

prosedur penelitian yang menghasikan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau tidak tertulis dari pelaku-pelaku yang diamati.

Berdasarkan pada pendekatan kualitatif, dapat ditemukan banyaknya fenomena dan makna lain yang masih tersembunyi atau belum banyak diketahui oleh kita semua.

1.7.5 Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya dan masih bersifat mentah karena belum diolah. Data ini diperoleh melalui:

1. Pengamatan / Observasi

Observasi yang dilakukan peneliti dalam penelitian ini adalah observasi terang-terangan, dimana peneliti dalam melakukan pengumpulan data menyatakan terus terang kepada sumber data, bahwa peneliti sedang melakukan penelitian. Sehingga pihak-pihak yang diteliti mengetahui sejak awal sampai akhir tentang aktivitas peneliti.

Peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari yang menjadi sumber data penelitian. Sehingga diperlukan data yang akurat, lengkap, tajam dan terpercaya. Selain itu peneliti juga melakukan observasi secara tersamar dimana pihak-pihak yang diteliti belum mengetahui bahwa peneliti sedang melakukan aktivitas meneliti.

2. Wawancara

Wawancara yang dilakukan peneliti terdiri dari tiga tahap. Tahap pertama meliputi pengenalan, memberikan gambaran singkat proses wawancara dan membangun hubungan saling percaya. Tahap kedua merupakan tahap terpenting dengan diperolehnya data yang berguna. Tahap terakhir adalah ikhtisar dari respon informan dan memungkinkan konfirmasi atau adanya informasi tambahan.

3. Data Sekunder

Sumber data sekunder ini merupakan sumber data yang diperoleh melalui kegiatan studi literatur atau studi kepustakaan dan dokumentasi mengenai data yang diteliti.

a. Studi kepustakaan

Pengumpulan data ini diperoleh dari berbagai referensi yang relevan dengan penelitian yang dijalankan dan teknik ini berdasarkan *text books* maupun jurnal ilmiah.

b. Studi dokumentasi

Studi dokumentasi, yakni pengumpulan data yang bersumber dari dokumen yang resmi dan relevan dengan permasalahan yang akan diteliti.

1.7.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah

mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka penelitian tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang merupakan kombinasi dari beberapa teknik yaitu:

1.7.6.1 Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya dan masih bersifat mentah karena belum diolah. Data ini diperoleh melalui:

1. Pengamatan/Observasi

Observasi biasa diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan dengan sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diteliti. Dalam penelitian ini peneliti langsung terjun ke lokasi penelitian dan melakukan pengamatan langsung terhadap objek-objek yang diteliti, kemudian dari pengamatan tersebut melakukan pencatatan data-data yang diperoleh yang berkaitan dengan aktivitas penelitian.

Selain itu observasi merupakan kegiatan yang meliputi pencatatan secara sistematis kejadian-kejadian perilaku, objek-objek yang dilihat dan hal-hal lain yang diperlukan dalam mendukung penelitian yang sedang dilakukan. Konsep yang dikemukakan oleh Faisal dalam Sugiyono (2009:226) yang mengklasifikasikan observasi sebagai berikut:

- a. Observasi berpartisipasi (*participant observation*)
- b. Observasi yang secara terang-terangan dan tersamar (*overt observation and covert observation*), dan

c. Observasi yang tidak terstruktur (*unstructured observation*)

Jadi berdasarkan pengklasifikasian observasi di atas, observasi yang dilakukan peneliti dalam penelitian ini adalah observasi terang-terangan, dimana peneliti dalam melakukan pengumpulan data menyatakan terus terang kepada sumber data, bahwa peneliti sedang melakukan penelitian. Sehingga pihak-pihak yang diteliti mengetahui sejak awal sampai akhir tentang aktivitas peneliti. Dan juga peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari yang menjadi sumber data penelitian. Sehingga diperlukan data yang akurat, lengkap, tajam dan terpercaya. Selain itu peneliti juga melakukan observasi secara tersamar dimana pihak-pihak yang diteliti belum mengetahui bahwa peneliti sedang melakukan aktivitas meneliti.

1. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, tetapi juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam. Teknik pengumpulan data ini mendasarkan diri pada laporan tentang diri sendiri atau *self-report* atau setidak-tidaknya pada pengetahuan dan atau keyakinan pribadi (Sugiyono,2012;72).

Wawancara mendalam adalah teknik pengolahan data yang pengumpulan data didasarkan pada percakapan secara

intensif dengan suatu tujuan tertentu untuk mencari informasi sebanyak-banyaknya. Wawancara dilakukan dengan cara mendapat berbagai informasi menyangkut masalah yang diajukan dalam penelitian. Wawancara dilakukan pada informan yang dianggap menguasai penelitian. Adapun wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur yang pewawancaranya menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan yang akan diajukan oleh peneliti.

Wawancara dilakukan dengan cara mempersiapkan terlebih dahulu berbagai keperluan yang dibutuhkan yaitu sampel informan, kriteria informan, dan pedoman wawancara yang disusun dengan rapih dan terlebih dahulu dipahami peneliti, sebelum melakukan wawancara peneliti terlebih dahulu melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Menerangkan kegunaan serta tujuan dari penelitian
- b. Menjelaskan alasan mengapa informan terpilih untuk diwawancarai
- c. Menentukan strategi dan taktik wawancara
- d. Mempersiapkan pencatat data wawancara

Hal-hal tersebut bertujuan untuk memberikan motivasi kepada informan untuk melakukan wawancara dengan menghindari keasingan serta rasa curiga informan untuk memberikan keterangan dengan jujur. Selanjutnya, peneliti mencatat keterangan-keterangan

yang diperoleh dengan cara pendekatan kata-kata dan merangkainya kembali dalam bentuk kalimat.

Wawancara perlu dilakukan lebih dari dua kali karena dua alasan utama. Pertama adalah pendekatan pengetahuan temporal. Istilah temporal maksudnya adalah istilah filosofis yang mendefinisikan bagaimana situasi dan pengetahuan orang saat itu dipengaruhi oleh pengalamannya dan bagaimana situasi saat itu akan menentukan masa depannya. Alasan kedua melakukan wawancara lebih dari satu kali adalah untuk memenuhi *criteria rigor* (ketepatan/ketelitian). Selain itu juga memungkinkan peneliti mengkonfirmasi atau mengklasifikasi informasi yang ditentukan pada wawancara pertama.

Jadi, dapat disimpulkan wawancara terdiri dari tiga tahap. Tahap pertama meliputi perkenalan, memberikan gambaran singkat proses wawancara dan membangun hubungan saling percaya. Tahap kedua merupakan tahap terpenting dengan diperolehnya data yang berguna. Tahap terakhir adalah ikhtisar dari respon informan dan memungkinkan konfirmasi atau adanya informasi tambahan.

Dalam penelitian mengenai Implementasi Program Indonesia Pintar di SMP 3 Satu Gebog Kabupaten Kudus, mengacu pada teori implementasi menurut Van Meter dan Van Horn (1975) dengan variabel yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan yaitu Sumberdaya, Karakteristik Agen Pelaksana, Sikap/Kecenderungan (disposition) para pelaksana, Komunikasi antar organisasi dan

aktivitas pelaksana, Lingkungan ekonomi, sosial, dan Politik.

1.7.6.2 Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder ini merupakan sumber data yang diperoleh melalui kegiatan studi literatur atau studi kepustakaan dan dokumentasi mengenai data yang diteliti.

1. Studi kepustakaan

Pengumpulan data ini diperoleh dari berbagai referensi yang relevan dengan penelitian yang dijalankan dan teknik ini berdasarkan *text books* maupun jurnal ilmiah.

2. Studi dokumentasi

Studi dokumentasi, yakni pengumpulan data yang bersumber dari dokumen yang resmi dan relevan dengan permasalahan yang akan diteliti.

Selanjutnya sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini terbagi atas data primer dan data sekunder. Data primer diambil langsung dari informan penelitian. Dalam hal ini data primer diambil melalui wawancara (interview). Sedangkan data sekunder adalah data yang tidak langsung berasal dari informan. Oleh karena itu, dalam penelitian ini data sekunder diperoleh melalui data-data dan dokumen-dokumen yang relevan mengenai masalah yang diteliti. Data-data tersebut merupakan data yang diperlukan dalam menyelesaikan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.

1.7.7 Analisis dan Interpretasi Data

Dalam penelitian kualitatif, analisis data merupakan kegiatan setelah data dari seluruh responden atau sumber data lain terkumpul. Kegiatan dalam analisis data ialah : mengelompokkan data, mengorganisasikan data, memilah data sehingga menjadi kesatuan yang dapat dikelola dan ditelaah sehingga data dapat disajikan. Pada metode ini data-data yang telah didapat dan dikumpulkan, lalu diolah untuk dianalisis terlebih dahulu kemudian dapat dijadikan dasar dalam pembuatan pembahasan. Analisis data kualitatif yaitu suatu jenis metode yang mengukur data secara langsung, dalam penelitian ini metode analisis data yang digunakan berupa :

1.7.7.1 Analisis Kualitatif

Analisis data kualitatif yaitu suatu jenis metode yang terbentuk dari kata, kalimat, skema dan gambar. Metode penelitian ini digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive, analisis data bersifat induktif/kualitatif, data hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.

1.7.7.2 Analisis Deskriptif

Metode analisis deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau

menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Statistik deskriptif dapat digunakan bila peneliti hanya ingin mendeskripsikan data sampel dan tidak ingin membuat kesimpulan yang berlaku untuk populasi dimana sampel diambil.

1.7.8 Kualitas Data

Reliabilitas menurut Sugiyono (2009: 269) dalam penelitian kualitatif sangat berbeda dengan yang terdapat pada penelitian kuantitatif. Bila dalam penelitian kuantitatif reliabilitas berkenaan dengan konsistensi data, di mana bila terdapat peneliti yang melakukan penelitian pada objek yang sama, maka akan mendapatkan data yang sama. Maka dalam penelitian kualitatif tidak demikian, suatu realitas (*social situation*) bersifat majemuk dan dinamis, sehingga tidak ada data yang bersifat konsisten dan berulang seperti semula. Adapun untuk pengujian, keabsahan datanya pada penelitian ini dilakukan dengan dua cara, yaitu :

a. Triangulasi

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu (Sugiyono, 2009: 273). Terdapat tiga jenis triangulasi, yaitu triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu. Namun dalam penelitian ini hanya menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh dari lapangan melalui beberapa sumber. Sedangkan triangulasi teknik dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama

dengan teknik yang berbeda. Pengecekan dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi.

b. Member check

Proses pengecekan data yang berasal dari pemberi data menurut Sugiyono (2009:276) Bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh data yang berasal dari pemberi data. Apabila data yang ditemukan disepakati oleh pemberi data, berarti data tersebut valid sehingga semakin kredibel. Namun, jika data yang diperoleh peneliti tidak disepakati oleh pemberi data, peneliti perlu melakukan diskusi dengan pemberi data dan apabila terdapat perbedaan tajam setelah dilakukan diskusi, peneliti harus mengubah temuannya dan menyesuaikannya dengan data yang diberikan oleh pemberi data. Pelaksanaan *member check* dapat dilakukan setelah satu periode pengumpulan data selesai atau setelah mendapatkan kesimpulan.

